

# STRATEGI PERANG SEMESTA MELALUI OPTIMALISASI NILAI-NILAI PANCASILA MENGHADAPI RADIKALISME PEGAWAI NEGERI SIPIL

## THE INDONESIA TOTAL WAR STRATEGY THROUGH OPTIMIZATION OF PANCASILA VALUES TOWARDS CIVIL STATE EMPLOYEE RADICALISM

Tjandra Ariwibowo, Lukman Yudho Prakoso, Helda Risman

UNIVERSITAS PERTAHANAN RI

(tjandra494@gmail.com, lukman.prakoso@idu.ac.id, rismancan@gmail.com)

**Abstrak** – Dinamika perkembangan perang saat ini yang cenderung ke arah peperangan asimetris, memaksa seluruh pemikir strategi untuk menghadapinya. Pola peperangan asimetris setelah perang dunia kedua salah satunya yang berkembang yaitu radikalisme agama. Beberapa periode sebelumnya radikalisme agama diusung kelompok dari wilayah negara lain untuk memaksakan kepentingannya melalui teror kekerasan. Untuk melanggengkan aksinya, kelompok ini mempopulerkan pola aliran radikalnya ke seluruh penjuru dunia dan seluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali di NKRI. Berbagai ciri-cirinya telah banyak diketahui oleh pemerintah yang langsung mengadakan evaluasi untuk menghadapinya. Penulis mencermati hal ini dengan meneliti di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mulai terkena pengaruhnya dan pola hubungan strategi perangnya melalui optimalisasi nilai-nilai pancasila pada pelatihannya. Tujuannya agar masyarakat memahami perihal perang yang terjadi dan cara untuk menghadapi radikalisme melalui penanaman nilai-nilai pancasila dalam pelatihan. Metode penelitiannya menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari berbagai literatur (buku, referensi, penelitian terdahulu), informasi, data, serta berbagai dokumen. Hasil akhirnya telah diterapkan strategi perang semesta melalui perumusan nilai-nilai pancasila dalam struktur kurikulum pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

**Kata Kunci:** Nilai-Nilai Pancasila, Optimalisasi, Pegawai Negeri Sipil, Radikalisme, Strategi Perang Semesta

**Abstract** – The current dynamics of war development which tend to be asymmetric warfare, compel all strategic thinkers to face it. One of the asymmetric patterns of warfare after the second world war was religious radicalism. In previous periods, religious radicalism was promoted by groups from other countries to impose their interests through violent terror. To perpetuate its actions, this group popularizes its radical flow patterns throughout the world and all levels of society, including in the Republic of Indonesia. Many of its characteristics have been recognized by the government, which immediately conducts an evaluation to deal with them. The author observes this by examining among Civilian Servants who are starting to be affected and the relationship patterns of their war strategies through optimizing Pancasila values in their training. The goal is that people understand about the war that is happening and how to deal with radicalism through the inculcation of Pancasila values in training. The research method uses library research by studying various literatures (books, references, previous research), information, data, and various documents. The end result has been implemented a universal war strategy through the formulation of Pancasila values in the basic training curriculum structure for Civilian Servant Candidates.

**Keywords:** Pancasila Values, Optimization, Civil State Employee, Radicalism, The Indonesia Total War Strategy

## Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil atau yang disebut PNS merupakan aset strategis pengelola administrasi seluruh perangkat pemerintahan di pusat dan daerah yang memiliki strategis yang ditinjau dari jumlah maupun lingkup kerjanya. Dari sisi jumlah menurut buku statistik ASN yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara per 31 Desember 2019 cukup signifikan yaitu sebesar 4.189.121 orang. Dari sisi lingkup pekerjaannya menangani administrasi seluruh bidang pemerintahan di pusat maupun daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014). Melalui jabatan pemerintahan dari skala kecil sampai skala nasional dapat memberikan pengaruh yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Sebagai abdi masyarakat, PNS yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik. Fungsi tersebut dilakukan secara

rutin dan dipertanggungjawabkan secara bertahap kepada publik. Harapan-harapan pemimpin terhadap PNS memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi, berkompeten dan berpengalaman di bidangnya. Harapan ini sangat rasional dihadapkan bahwa pegawai pemerintah sebagai ujung tombak masyarakat dalam menjalankan fungsi pemerintahan maupun pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Berbagai harapan terhadap kinerja PNS yang baik juga muncul dari kalangan masyarakat agar dapat melayani dengan baik, profesional dan akuntabel.

Harapan terhadap PNS yang profesional dan akuntabel tentunya ditunjang dengan pendapatan yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai dan pendidikan maupun pelatihan yang berkompeten. Saat ini para *stake holder* pemerintahan telah merancang berbagai konsep untuk menuju terwujudnya harapan masyarakat. Gambaran tentang kinerja PNS saat ini sedikit demi sedikit mulai mengarah pada profesionalitas dan kompetensi yang ditunjukkan dalam pembangunan kinerja. Indikator pembangunan kinerjanya nampak dari hasil pembangunan masyarakat/negara yang dinilai dari kompetisi global negara-

negara di dunia (*The Global Competitiveness Report*). Pada kurun waktu dua tahun terakhir 2017-2018 Indonesia menduduki pada posisi 36 dari 137 negara ternilai (Klaus Schwab, 2016). Hal ini memberi gambaran bahwa kinerja pegawai pemerintah yang ditunjukkan dari *outcome* di kompetisi global masih dapat bersaing.

Kinerja PNS dalam pemerintahan telah mengarah pada profesionalitas dan kompetensi global yang lebih baik, mendapat gangguan berupa ancaman degradasi kinerja yang dapat menurunkan *outcome* kinerjanya. Ancaman faktual yang membuat miris banyak kalangan melalui ancaman radikalisme agama. Seperti pada tahun 2018 Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Mayjen (Purn) Soedarmo menyebut 19,4 pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Pernyataan Soedarmo tersebut merujuk pada hasil survei yang dilakukan *Alvara Research* pada 2017. Data inilah yang menjadi dasar dari keprihatinan radikalisme di kalangan ASN (Riyanta, 2020). Pernyataan ini di dalamnya merinci beberapa kasus tertangkapnya PNS yang terlibat dan mendukung gerakan terorisme di dalam maupun luar negeri.

Fenomena radikalisme tersebut memerlukan strategi perang semesta yang mewajibkan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa, termasuk mempertahankan ideologi yang telah disepakati pendiri bangsa. Strateginya dirumuskan melalui pelatihannya, yang secara khusus pada pola kurikulumnya, dan bahan ajar pelatihan untuk menghadapi radikalisme agama. Penulis melihat bahwa permasalahan kebangsaan dari fakta diatas memerlukan strategi perang semesta yang mempertimbangkan ideologi bangsa. Tulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi perang semesta dengan pendekatan ideologi pancasila dalam menghadapi ancaman radikalisme agama di kalangan PNS, menggunakan strategi pelatihan dasar CPNS.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang ditempuh menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menganalisis teks (Hamzah, 2020) dari berbagai literatur (buku, referensi, penelitian terdahulu), informasi, data, serta berbagai dokumen yang terkait pelatihan dasar CPNS dalam mengoptimalkan nilai-nilai pancasila.

Pada studi keputusannya menggunakan teknik pengumpulan data melalui penelaahan literatur, informasi, data, dokumen laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis. Prosesnya penelitiannya dengan mengevaluasi pola pelatihannya, kurikulumnya, dan strategi pelatihan yang dapat digunakan untuk saran dan masukan pengembangan pelatihan.

Langkah-langkah yang dilakukan yaitu pemilihan topik, eksplorasi informasi, menentukan fokus penelitian, pengumpulan sumber data, persiapan penyajian data, penyusunan laporan. Sumber data yang digunakan seputar masalah dari topik yang dibahas. Teknik pengumpulan datanya mencari dokumen, data terkait hal-hal pembahasan dengan *check list* klasifikasi bahan. Sedangkan teknik analisisnya menggunakan analisis konten untuk mendapatkan informasi relevan dengan meneliti ulang bahan dan hasil. Prosesnya yang dilakukan yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah data dan informasi terkait permasalahan.

### **Hasil dan Pembahasan Strategi Perang Semesta menghadapi Radikalisme**

Radikal istilah yang diadopsi dari dunia barat yang berarti juga sebagai

paham yang menginginkan adanya suatu perubahan melalui cara kekerasan (Kemdikbud, 2016b). Dari abad pertengahan di Eropa, radikalisme hiper rasionalis yang semakin populer saat ini digunakan sebagai bentuk perlawanan untuk menanamkan kehendak politik maupun ideologi kelompok tertentu (Taylor, 2010). Akhir-akhir ini radikalisme banyak digunakan oleh kelompok yang mengatasnamakan agama untuk meneruskan atau mengembangkan kelompoknya dengan merekrut anggota baru yang sepaham dengan ideologi atau politiknya. Dalam dinamikanya, kecenderungannya digunakan radikalisme digunakan oleh kelompok agama dan lebih bersifat radikalisme agama. Praktik radikalisme agama banyak diusung untuk menanamkan kesepahaman dogma agar mengikuti kelompok yang mensosialkannya.

Praktik radikalisme di Indonesia tidak terstruktur lebih jelas dalam penanamannya, sehingga diterapkan sebagai bentuk peperangan asimetris. Peperangan asimetris yang merupakan pola peperangan yang banyak dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi bentuk perangnya masih bersifat konvensional (Kemhan RI, 2015). Pola

peperangan yang digunakan untuk memenangkan perebutan ideologi di kalangan masyarakat. Suatu ideologi agama secara radikal yang ingin menunjukkan eksistensinya agar dipahami orang atau kelompok yang ingin bergabung di dalamnya. Ideologi yang secara jelas ingin mengaburkan ideologi asli bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Di era yang serba global dan ditopang perkembangan teknologi informasi secara menyeluruh, bukan hal yang mustahil ideologi asing mudah masuk dan menjadi populer bila tidak diantisipasi.

Kenyataan ini juga didorong adanya perubahan pemahaman Pancasila di kalangan masyarakat akibat pergeseran kondisi dulu. Pergeseran pemahaman seluruh / sebagian masyarakat yang melemahkan Pancasila akibat tekanan internal dan eksternal bangsa. Pelemahan Pancasila ditimbulkan dari empat faktor, yang *pertama* karena keteledoran, ketidaktaatan, dan penyelewengan atas nilai-nilai Pancasila oleh bangsa sendiri; *kedua*, konsekuensi dari peralihan mentalitas masyarakat pasca kolonial; *ketiga*, karena kelemahan ketahanan nasional dalam menghadapi pengaruh penetrasi arus globalisasi; keempat akibat serangan ideologis dari peperangan

generasi kelima yang tak kasat mata (Latif, 2020). Kenyataan yang nyata ini secara langsung memengaruhi perkembangan pemikiran radikalisme keagamaan di Indonesia. Berbagai elemen bangsa telah merespon perkembangan ini yang menjadikan kondisi ini pada perang semesta.

Perang semesta dalam hal ini merupakan bentuk perlawanan seluruh rakyat yang mengerahkan segenap kekuatan dan sumber daya nasional untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari bangsa lain yang mengancam atau menduduki wilayah NKRI (Prabowo, 2009). Perang semesta menghadapi radikalisme merupakan perang dalam bentuk ancaman ideologi asing yang berusaha menguasai bangsa dan menduduki dalam wilayah NKRI. Perang menghadapi kondisi demikian, memerlukan suatu strategi khusus non militer. Strategi untuk menghadapinya menggunakan tujuan (*ends*), cara yang ditempuh (*ways*), dan sarana yang digunakan (*means*) (Clausewitz, 1989). Tujuannya untuk mengeliminir dan menghilangkan paham radikalisme yang berjalan di lingkungan pemerintahan. Cara yang ditempuh menggunakan pelatihan yang berbasis kurikulum

dengan penguatan nilai-nilai pancasila. Adapun sarana yang digunakan melalui sarana pelatihan dasar CPNS di instansi-instansi pemerintah.

### **Strategi Kurikulum Pelatihan**

Hasil penelitian bahwa pelatihan dasar setelah perekrutan PNS menggunakan pola pelatihan Klasikal atau *Blended Learning* (mandiri, *distance learning*, Klasikal) dengan *e-learning* dan aktualisasi yang dituangkan dalam peraturan untuk diselenggarakan dalam 51 hari kerja terdiri dari program 3 hari pengenalan lingkungan, 18 hari kerja *on campuss* dan 30 hari *off campuss*. Dari program pelatihan yang sangat singkat terutama pada pembekalan materi di kelas (klasikal) hanya 18 hari, namun memiliki 3 agenda utama untuk disampaikan secara klasikal dan praktik lapangan serta 1 agenda berupa sintesa. Pola pelatihan *on campuss* memberikan materi klasikal berupa tatap muka antara widyaiswara dengan peserta didik dalam beberapa jam pelajaran. Struktur kurikulum yang diterapkan selama pelatihan yang menjadi titik pangkal untuk mengoptimalkan karakter bangsa yang nantinya dapat mengaktualisasikan nilai-nilai pancasila. Kurikulum pembentukan karakter dalam pelatihan

CPNS dilaksanakan selama 511 (lima ratus sebelas) jam pelajaran atau setara dengan 51 (lima puluh satu) hari kerja atau menggunakan *blended learning* yang dilaksanakan selama 647 (enam ratus empat puluh tujuh) JP atau setara dengan 74 (tujuh puluh empat) hari kerja (PerLAN RI, 2021). Menurut Ansyar (2017) desain kurikulum yang dapat membantu perbaikan kehidupan sosial masyarakat untuk mencapai kehidupan masa depan yang adil, dengan terpusat pada masalah (*the problem centered designs*) yang berfokus pada pemecahan masalah, individu dan sosial.

Nilai-nilai pancasila yang dituangkan dalam kurikulum materinya cukup dalam dan komprehensif, serta sesuai dengan bidang tugasnya sebagai tujuan keluaran pelatihannya. Melalui nilai-nilai pancasila ini memang diharapkan peserta latihan dapat mengenal karakter bangsa Indonesia. Karakter yang digali dari leluhur, yang dapat mencirikan identitas suatu bangsa. Identitas yang menurut Parsudi Suparlan sebagai suatu pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalam suatu golongan yang dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-ciri yang merupakan suatu kesatuan bulat dan menyeluruh, serta menandainya sehingga dapat

dimasukkan dalam golongan tersebut (Arif, 2014). Identitas yang akan mengenali seseorang atau sekelompok dari karakter atau jati diri. Jati diri suatu bangsa yang selalu mencerminkan tingkah lakunya sehari-hari yang mengamalkan nilai-nilai budaya secara kelompok.

Pengamalan nilai budaya secara kelompok identitas sepenuhnya bersifat sosial dan kultural karena dua alasan, pertama, pandangan tentang bagaimana seharusnya menjadi seseorang adalah pertanyaan kultural (sebagai contoh: individualisme adalah ciri khas masyarakat modern, utamanya barat); kedua, sumber daya yang membentuk materi bagi proyek identitas (yakni bahasa & praktik kultural) berkarakter sosial. Pelaksanaan pada saat pelatihan dasar CPNS juga memberikan maksud demikian, terlihat pada masing-masing bahan ajar yang dibentuk dari struktur kurikulumnya. Kurikulum pelatihannya terdiri dari orientasi api semangat bela negara, agenda berperilaku bela negara, agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, agenda habituasi. Selain itu juga dikuatkan dengan kompetensi teknis bidang tugas yang terdiri kompetensi teknis administratif dan teknis substantif.

Keseluruhan agenda memberikan pemahaman nilai-nilai budaya secara kelompok, yang terlihat pada latar belakang dan tujuan bahan ajarnya. Yang dapat diukur dengan identifikasi bangsa, sikap terhadap bangsa, dan stereotip nasional. Selanjutnya akan dilihat ukuran-ukuran dan bentuk nasional Indonesia pada agenda bahan ajarnya.

*Agenda pertama* sikap perilaku bela negara, memuat pemahaman peserta pelatihan dalam memahami cara pandang atau wawasan kebangsaannya melalui sikap bela negara. Sikap yang harus ditunjukkan oleh peserta pelatihan melalui kemampuan kesiapsiagaan jasmani dan rohani yang nantinya ditunjukkan dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Kesiapsiagaan dari kondisi yang dihadapi bangsa dari ancaman-ancaman bangsa dan negara lain terhadap kesatuan dan persatuan. Radikalisme yang menjadi ancaman bangsa terutama telah memsuki ancaman radikalisme agama di kalangan PNS dihadapi dengan strategi pelatihan berbasis bela negara, dengan memberi wawasan akar budaya bangsa dan menunjukkan radikalisme bukan bagian dari nilai-nilai budaya bangsa. Dalam agenda ini pelatihan sebagai pembelajarannya meliputi wawasan

kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara.

*Agenda kedua* nilai dasar PNS, yang memiliki struktur pembelajaran nilai yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya secara profesional sebagai abdi dan melayani masyarakat yang berkemampuan akuntabel, mengutamakan kepentingan nasional, menjunjung etika publik, berinovasi, tidak korup dalam menjalankan tugasnya. Aspek mengutamakan kepentingan nasional dalam bahan ajarnya diharapkan dapat memberikan pemahaman nasional bangsa yang memiliki falsafah pancasila dan bukan mengadopsi ideologi atau paham bangsa lain yang justru berdampak negatif terhadap falsafah bangsa. Dalam agenda ini mata pelatihan yang diberikan meliputi akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi.

*Agenda ketiga* kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, sebagai bagian dari komponen bangsa PNS memiliki peran dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa, yang mampu mengelola banyaknya tantangan dan hambatan dalam pemerintahan.

Tantangan dan hambatan adanya ancaman radikalisme agama dari negara lain untuk dapat dihadapi sesuai kedudukan dan perannya. *Agenda ketiga* memiliki pembahasan dalam pelatihannya berupa manajemen ASN, pelayanan publik, *whole of government*.

*Agenda keempat* habituasi atau penyesuaian supaya menjadi terbiasa (terlatih) pada habitat (Kemdikbud, 2016a) di lingkungan pekerjaannya. *Agenda* yang melatih peserta melakukan penyesuaian dengan membiasakan diri mewujudkan kompetensi yang diperoleh dari berbagai materi pelatihannya. Kegiatan ini disamping membiasakan fokus pada bidang profesinya dan sekaligus dapat membedakan makna ancaman radikalisme yang memasuki pada bidangnya. *Agenda keempat* ini memiliki mata pelatihan yang meliputi konsepsi dan penjelasan, rancangan dan bimbingan, evaluasi rancangan, pembekalan, aktualisasi di tempat kerja, serta evaluasi.

Keseluruhan struktur kurikulum yang diberikan secara klasikal (kelas) dan praktik di lapangan dalam pelatihan dasar CPNS merupakan bentuk akumulasi nilai-nilai pancasila tergabung pada pelaksanaan agenda satu, dua, ketiga, dan

empat. Harapan implementasi nyata dari pelatihan dasar ini diteruskan pada pelatihan-pelatihan yang berjenjang sesuai kenaikan golongan dalam struktur jabatan PNS. Evaluasi pelatihan secara menyeluruh dan memberikan hasil outcome positif masih ditunggu dalam beberapa periode ke depan. Evaluasi yang mudah dibuktikan secara nyata dari pemberitaan tidak terpaparnya PNS oleh paham radikalisme agama.

### **Nilai-Nilai Pancasila yang Terkandung dalam Materi Pelatihan**

Nilai-nilai pancasila yang terwujud dalam keseharian masyarakat merupakan paham asli bangsa yang digali dari akar kehidupan bangsa dan harus tetap diimplementasikan kegiatan sehari-hari bangsa (Adha, 2020). Para *founding fathers* mencari jati diri bangsa dan telah menemukan bahwa nilai-nilai kehidupan sehari-hari bangsa dituangkan dalam nilai-nilai Pancasila (Briando, 2019). Nilai-nilai pancasila sudah seharusnya terus dijaga dan dipupuk kelestariannya. Peran serta seluruh komponen bangsa dituntut untuk menjaga dan memupuk kelestariannya, di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi dinamis dunia menciptakan perubahan-perubahan yang mempengaruhi nilai-nilai jati diri bangsa

dan jati diri bangsa Indonesia dapat terpengaruhinya. Cara melestarikannya dilakukan dengan berbagai cara mulai dari melestarikan adat budaya sehari-hari, pengenalan jati diri bangsa di sekolah sampai perguruan tinggi dan pada pelatihan-pelatihan pegawai. Pelatihan CPNS yang memiliki kurikulum dan penyampaian materi secara fisik (kelas) maupun praktik, telah dirancang sedemikian rupa untuk merumuskannya.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dulu sampai saat ini, terangkum dalam modul/materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Di dalamnya memberikan pemahaman bahwa menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan dan mendudukan peran agama sebagai sentral kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai dimensi, privat maupun publik (Basseng, 2019). Yang menjadi penekanan dalam materi ini yaitu keagamaan merupakan sumber etika dan spritual yang penting dalam dasar etika bernegara, tetapi Indonesia bukan negara sekuler. Bahkan pada modul/materi analisis isu kontemporer telah menjelaskan untuk dibahas gerakan anti radikalisme untuk diimplementasikan yaitu kebangsaan dan persatuan, kemanusiaan dan penghormatan harkat dan martabat manusia, ketuhanan dan toleransi, kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, serta demokrasi dan kekeluargaan (I. Idris et al., 2019). Pada modul nasionalisme dibahas secara mendalam pemahaman dan implementasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa bagi ASN (A.Idris, 2015).

Modul/materi antikorupsi juga membahas nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang meletakkan kesadaran anti korupsi sebagai kesadaran yang menyentuh *spiritual accountability* (KPK, 2015).

Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari berbagai pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad yang tidak sesuai dengan azas kemanusiaan. Penuangan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam modul / materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang memberikan pemahaman keberadaban dan solidaritas bangsa terhadap warga negara dengan memberi jaminan hak asasi manusia dan komitmen bangsa Indonesia untuk memuliakan nilai kemanusiaan. Materi analisis isu kontemporer menyatakan pembahasannya bahwa kecerdasan moral sebagai kapasitas mental sangat menentukan prinsip kemanusiaan secara universal. Materi analisis isu kontemporer membahas bahwa etika merupakan perilaku bermoral yang berkaitan dengan dasar kemanusiaan dengan berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan sebaliknya. Pada materi nasionalisme, membahas pemahaman dan implementasi nilai-nilai kemanusiaan bagi ASN. Materi komitmen mutu, membahas

nilai kemanusiaan sebagai kesadaran berorientasi pada mutu semua kegiatan merupakan sifat kemanusiaan yang kuat. Pada materi anti korupsi membahas upaya mengembalikan nilai kebiasaan yang bergeser dari konteks seharusnya ditumbuhkan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan.

Sila Persatuan Indonesia, digali dari pengalaman kesadaran adanya politik pecah belah bangsa (*divide et impera*) yang dilakukan oleh penjajah pada masa kolonialisme. Penuangan nilai ini terdapat dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang menekankan bahwa persatuan Indonesia merupakan bentuk ekspresi dan pendorong semangat gotong royong untuk melindungi bangsa dan negara. Pada materi kesiapsiagaan menekankan pembahasan rasa persatuan merupakan rasa senasib sepenanggungan serta terbangunnya ikatan bathin yang diperlukan dalam menjalankan tugas. Pada materi akuntabilitas, menjelaskan bahwa menjadi PNS yang akuntabel berdasarkan pada asas persatuan dan kesatuan. Pada materi nasionalisme, menjelaskan prinsip nasionalisme bangsa Indonesia menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan

pribadi atau golongan. Pada materi etika publik, nilai persatuan Indonesia terangkum dalam pembahasan rumusan Sumpah Prasetya Korpri, yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, kesejahteraan masyarakat serta kesetiakawanan Korpri. Materi Antikorupsi, membahas nilai ini dengan menekankan pada semangat kebatinan bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya.

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia dari turun temurun dalam pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Penuangan nilai ini terdapat dalam materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, yang menekankan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan memberikan arti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Pada materi analisis isu kontemporer membahas rumusan peri kerakyatan dan peri kesejahteraan dalam pancasila merupakan dasar bangsa dan negara sekaligus sebagai pandangan hidup untuk menyelaraskan segala perbedaan. Pada

materi nasionalisme juga membahas perlunya pemahaman dan implementasi nilai-nilai kerakyatan dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan bagi ASN.

Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip dasar yang populer berkembang di kalangan masyarakat dengan istilah sikap gotong royong. Nilai-nilai sila ini terangkum dalam materi nasionalisme yang membahas pemahaman dan implementasi nilai-nilai keadilan sosial bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. Materi *Whole of Government* membahas kesesuaian proses pelayanan dengan standar operating procedures yang ada, keterbukaan informasi, keadilan, dan kecepatan dalam pelayanan dan kemudahan masyarakat melakukan pengaduan. Materi pelayanan publik membahas prinsip pelayanan publik yang berkeadilan dengan tujuan melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Pada materi manajemen ASN membahas bahwa sistem manajemen ASN menjamin keadilan dan menyediakan prinsip keterbukaan karier pegawai. Materi anti korupsi membahas untuk mengembalikan nilai dan kebiasaan yang telah bergeser dari konteks seharusnya

ditumbuhkan kembali dengan semangat keadilan dan kemanusiaan. Materi komitmen mutu menekankan nilai budaya kerja aparatur salah satunya mencerminkan keadilan dan keterbukaan. Materi etika publik menyoroti nilai keadilan sosial merupakan refleksi kritis yang mengarahkan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan. Materi akuntabilitas juga menyoroti keadilan sebagai landasan utama dari akuntabilitas. Dalam materi isu kontemporer menyoroti pedoman moral dalam penegakan hukum, *good governance* dan keadilan sosial merupakan upaya mengurangi tindakan teroris. Materi kesiapsiagaan lebih menitik beratkan nilai keadilan sosial dalam kewaspadaan dini (deteksi dan peringatan dini). Sedangkan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, membahas secara rinci keadilan sosial dalam Undang Undang Dasar 1945, hiarkis piramidal pancasila, komitmen dalam demokrasi, dan implementasi politik luar negeri.

Keseluruhan nilai-nilai pancasila yang terangkum dalam modul/materi pelatihan dasar CPNS dapat memberikan kontribusi positif menghadapi radikalisme agama sekaligus memberikan pelayanan publik yang profesional.

Pelayanan publik yang profesional tidak hanya membutuhkan kompetensi teknis dan *leadership*, namun juga kompetensi etika (Suhanda, 2018). Nilai-nilai pancasila yang telah tertuang dalam materi dalam struktur kurikulum pelatihan merupakan jawaban atas strategi perang semesta menghadapi ancaman radikalisme agama di kalangan PNS.

### **Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan**

Strategi perang semesta melalui optimalisasi nilai-nilai pancasila menghadapi radikalisme PNS mulai dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait sesuai dengan penanganan pertahanan nir militer salah satunya melalui pelatihan dasar CPNS. Strateginya yang memiliki unsur tujuan (*ends*) yang akan dituju untuk mengeliminir dan menghilangkan paparan radikalisme global di lingkungan PNS. Unsur cara yang ditempuh (*ways*) menggunakan struktur kurikulum pelatihan dasar CPNS yang mengadopsi pendekatan pada masalah (*the problem centered designs*) dengan fokus pemecahan masalah, individu dan sosial, dan memiliki empat agenda yang merumuskan nilai-nilai pancasila di dalamnya. Unsur sarana yang digunakan (*means*) melalui pelatihan CPNS yang

nantinya menjadi aktor utama pengawakan organisasi di seluruh instansi pemerintah, yang dilatih di berbagai pusat pelatihan PNS di tanah air. Dari pelaksanaan strategi yang mulai digunakan saat ini di berbagai instansi, evaluasinya masih bersifat sektoral. Sehingga dampak secara nasional belum terlihat, untuk itu rumusan evaluasi secara nasional mutlak diperlukan untuk mengeliminir ancaman sekaligus peningkatan profesionalitas penyelenggara negara. Keterbatasan hasil dari metode yang digunakan dalam penelitian ini, memerlukan penelitian lebih lanjut secara seksama.

#### Daftar Pustaka

- Adha, M. M. (2020). Kekuatan Nilai-nilai Pancasila dalam Membangun Kepribadian Masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(01), 121–138. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i01.319>
- Ansyar, M. (2017). *Kurikulum: Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan* (Pertama). Kencana.
- Arif, Z. A. D. P. E. I. L. (2014). *Pendidikan Bela Negara*. UPN Veteran.
- Basseng, Sammy Ferrijana, T. S. (2019). *Wawasan Kebangsaan Dan Nilai-Nilai Bela Negara (Modul I Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dan III)*. In Lembaga Administrasi Negara.
- Briando, P. Y. P. B. (2019). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Penyusunan Kode Etik Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2), 245. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.245-264>
- Clausewitz, C. Von. (1989). On war. In M. H. & P. Paret (Ed.), *Princeton University Press* (1989th ed.). Princeton University Press. [http://books.google.com/books?id=-xsoV5ET9J8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:EDMUND+HUSSLER+intitle:THE+CONFRONTATION+WITH+HEIDEGGER&cd=1&source=gbs\\_api](http://books.google.com/books?id=-xsoV5ET9J8C&printsec=frontcover&dq=inauthor:EDMUND+HUSSLER+intitle:THE+CONFRONTATION+WITH+HEIDEGGER&cd=1&source=gbs_api)
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research* (F. R. Akbar (ed.); Revisi). Literasi nusantara Abadi.
- Idris, A. D. S. K. J. K. S. E. M. (2015). *Nasionalisme Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III*. LAN RI.
- Idris, I., Suwarno, Y., Purwana, B. H., Dendi, S., Imran, S., Nusa, B. S. P., & Sejati, T. (2019). *Analisis Isu Kontemporer Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III*. LAN RI.
- Kemdikbud. (2016a). *KBBI Daring: Habituasi*. Kemdikbud.Go.Id. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/habituasi>
- Kemdikbud. (2016b). *KBBI Daring: Radikalisme*. Kemdikbud.Go.Id. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/radikalisme>
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 1689 (2014). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Kemhan RI. (2015). *Buku putih*. In Kementrian Pertahanan Republik

Indonesia.

- Klaus Schwab. (2016). The Global Competitiveness Report. In *World Economic Forum* (Vol. 21, Issue 3). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9639.1999.tb00817.x>
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila: Bintang Penuntun untuk Pembudayaan* (Komprehens). Mizan.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). "Anti Korupsi" Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan I/II dan III. *Lembaga Administrasi Negara*, 1–122.
- Peraturan LAN RI No. 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 (2021).
- Prabowo, L. T. J. (2009). *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta* (Pertama). PPSN.
- Riyanta, S. (2020). *Menyikapi Radikalisme di Kalangan ASN*. Indonews.id. <https://indonews.id/artikel/28205/Menyikapi-Radikalisme-di-Kalangan-ASN/>
- Suhanda. (2018). Diskursus Peningkatan Kompetensi dan Kode Etik ASN Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Jurnal Kediklatan*, 3(2), 409–418.
- Taylor, B. (2010). Religion , Radicalism , and Fantasy. *History*, 39(39), 102–112.